

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A.Zainal Abidin Farid. 1995. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum*. PT. Toko Gunung tbk. Jakarta.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia. Sleman.
- Andi Fuad Usfa. 2006. *Pengantar Hukum Pidana Edisi Revisi*. UMM Pers. Malang.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press. Makassar.
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. UNPAM Press. Pamulang.
- Didik Endro Purwoleksono. 2014. *Hukum Pidana*. Airlangga University Press (AUP). Surabaya.
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi. 2002. *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Storia Grafika. Jakarta.
- M.Yahya Harahap. 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Marwan Mas. 2014. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Moeljatno. 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Bina Aksara. Jakarta.
- Monang Siahaan. 2015. *KPK dan Polri Bersatulah Memberantas Korupsi*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Ruslan Renggong. 2019. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Prenamedia Group. Jakarta.
- Sudarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Sinar

Baru. Bandung.

-----, 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. PT.Alumni Bandung.

Teguh Prasetyo. 2018. *Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada. Depok.

### **Jurnal**

Andre G.Mowey. 2016. *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum*. Lex Crimen, Vol.5(2).

Fitri 'Aini Azhari, et.al. 2020. *Hukuman Koruptor Makin Enteng "Korupsi Makin Marak"*. Jurnal Ilmu Hukum Humaniora, Vol.1(1).

Hendar Putranto. 2019. *Greget Baru Desain Pemahaman Korupsi*. Jurnal Kawistara, Vol.9 (3).

Iriyanto Tiranda, et.al. 2019. *Konsep Ideal Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar Berdasarkan Asas Peradilan*. Jambura Law Review, Vol.1 (2).

Laurensius Arliman. 2015. *Tinjauan Kedudukan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran*. Jurnal Arena Hukum, Vol.8(2).

M.Sofian Assori. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Jurnal IUS, Vol.3 (9).

Nguyen Ngoc Thach, et.al. 2017. *Effects of Corruption on Economic Growth- Empirical Study of Asia Countries*. Imperial Journal of Interdisciplinary Research (IJIR), Vol.3 (7).

Oksidelfa Yanto. 2017. *Efektifitas Putusan Pidana Maksimal Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan*. Law Journal, Vol.1 (2).

Shang-Jin Wei. 1999. *Corruption in Economic Development Beneficial Grease, Minor Annoyance, or Major Obstacle*. Policy Research Working Paper.

Sumarni Alam. 2017. *Tinjauan Yuridis atas Tindak Pidana Korupsi dalam Praktek di Indonesia*. Jurnal Hukum Replik, Vol.5 (2).

Vivi Arfiani Siregar dan Indra Mukhlis. 2020. *Regulasi Perlindungan Hukum sebagai Wujud Peningkatan Pendayagunaan Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Riau Law Journal, Vol.4 (1).

## **Website**

<https://biropk.uinjkt.ac.id/wewenang-dan-tugas-kuasa-pengguna-anggaran-kpa-dalam-hal-pengadaanbarangjasa/#:~:text=Uraian%20tugas%20Kuasa%20Pengguna%20Anggaran%20%28KPA%29%20Melaksanakan%20rencana,dan%20arah%20terhadap%20pelaksanaan%20kegiatan%20dan%20pengelolaan%20keuangan.> (diakses pada 14 Februari pukul 22.57)

<https://riset.ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2020-korupsi-respons-covid-19-dan-kemunduran-demokrasi/?preview=true> (diakses pada 10 Januari 2022 pukul 17.26 WITA)

<https://telisik.id/news/indonesia-urutan-3-paling-korup-di-asia-2020> (diakses pada 10 Januari 2022 pukul 17.32 WITA)

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.